

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pembangunan yang dilakukan setiap negara memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Bahkan pembangunan telah dilakukan oleh sebuah negara sebelum era globalisasi seperti sekarang ini.

Pembangunan suatu negara dihadapkan oleh berbagai tantangan, terlebih untuk negara-negara yang termasuk kedalam golongan negara berkembang. Masalah yang dihadapi biasanya berkaitan dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan naiknya tingkat kualitas dan kesejahteraan penduduknya. Laju pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan ini tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seiring waktu mengalami penurunan (Indramawan, 2014).

Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi selama ini erat kaitannya dengan meningkatnya pertumbuhan dan pola penyebaran penduduk yang kurang seimbang jika dibandingkan dengan penggunaan sumberdaya alam serta daya dukung lingkungan yang tersedia. Selain itu, kerusakan yang terjadi akibat kurang tegasnya pemerintah dalam pembuatan peraturan mengenai penggunaan sumber

daya alam dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah di beberapa daerah (Nugroho, 1999).

Secara umum, masalah lingkungan disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Selain itu, ada penyebab kerusakan lainnya yaitu sampah (*refuse*) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam hal ini sampah yang dimaksudkan adalah sampah yang bersifat padat dan merupakan sisa dari konsumsi rumah tangga (Manik, 2003).

Masalah utama di lingkungan pemukiman dan masih belum terpecahkan adalah masalah limbah, baik cair maupun padat (sampah). Bahan limbah tersebut masih belum sepenuhnya ditangani dengan baik, terlebih limbah sampah. Kendala utama adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan limbah serta penempatannya di tempat pembuangan akhir (Karo, 2009).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 4 dan pasal 5, bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 11 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan

berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang diberi tanggung jawab.

Volume sampah yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga disebabkan oleh pola konsumsi rumah tangga tersebut. Semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga maka akan semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Menurut Teori konsumsi Keynes, konsumsi yang dilakukan saat ini tergantung dari pendapatan yang siap dibelanjakan saat ini (*disposable income*) (Mankiw, 2012).

Pendapatan rumah tangga memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi yang dilakukan suatu rumah tangga. Berdasarkan pandangan Keynes, tingkat konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga (Sukirno, 2004). Semakin tinggi pendapatannya maka semakin tinggi pula konsumsi yang dilakukan. Tingkat konsumsi yang tinggi akan mempengaruhi produksi limbah sampah yang juga akan meningkat. Volume sampah yang terus meningkat seiring berjalannya waktu menjadikan hal ini menjadi masalah baru bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk di tiap tahunnya. Berdasarkan *CIA World Factbook* tahun 2013, Indonesia merupakan urutan ke empat negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 253.609.643 jiwa atau sebesar 4 persen dari total jumlah penduduk dunia. Di Indonesia, persoalan sampah sudah menjadi masalah yang serius terutama di daerah-daerah perkotaan yang pertumbuhan ekonomi dan penduduknya selalu

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang konsumtif.

Tingkat konsumsi yang tinggi mengakibatkan limbah padat atau sampah menjadi masalah utama dalam kebersihan lingkungan. Timbulan sampah merupakan banyaknya sampah yang dihasilkan orang per hari dalam satuan volume atau berat. Timbulan sampah padat akan bertambah tiap harinya dan tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi, atau diminimalisasi secara baik. Pemerintah pusat maupun daerah menggalakkan berbagai kebijakan mengenai pengolahan sampah sisa konsumsi.

Pemberian nilai ekonomi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan pun dilakukan untuk melihat sejauh mana kerusakan terjadi. Nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Konsep ini disebut kesediaan untuk membayar atau *willingness to pay* (WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui pengukuran kesediaan menerima atau *willingness to accept* (WTA) yang merupakan jumlah minimum pendapatan seseorang mau menerima penurunan sesuatu (Ali, 2012).

Beberapa hal yang mendasari seseorang untuk melakukan *willingness to pay* adalah pendapatan orang tersebut. Dengan pendapatan, seseorang dapat memperkirakan seberapa besar dia mampu untuk membayar agar dapat memperoleh barang dan jasa

yang diinginkan. Pendapatan merupakan tolok ukur utama dalam menentukan seberapa besar kesediaan konsumen untuk mampu atau bersedia membayar.

Selain pendapatan, pendidikan juga mempengaruhi kesediaan seseorang untuk membayar suatu barang dan jasa, terutama mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mengerti bagaimana pentingnya dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan agar tetap lestari dan seimbang.

Salah satu kota besar yang memiliki persoalan serius dalam masalah sampah adalah kota Jakarta. Persoalan sampah sudah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Pemkot DKI Jakarta dan masih belum mendapatkan jalan keluarnya. Jumlah sampah yang terangkut ke TPST Bantargebang mencapai 6000 - 6500 ton per hari, dan itu bukan volume sampah secara keseluruhan. Artinya masih terdapat sampah yang tidak terangkut dan dibiarkan begitu saja. Masalah sampah disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya : jumlah penduduk yang terlalu padat, volume sampah yang tidak sebanding dengan daya tampung TPA, luas TPA yang semakin sempit karena penggunaan lahan untuk pemukiman, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan (Roswati, 2015).

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung dengan luas wilayah 19,96 km². Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 di Bandar Lampung terjadi pemekaran kecamatan sehingga wilayahnya dibagi ke dalam 20 kecamatan, yang terdiri dari 126 kelurahan dan 26 wilayah kelurahan di daerah

pantai. Bertambahnya kecamatan mengindikasikan terjadinya pertambahan jumlah penduduk. Daerah Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung, persoalan sampah sudah menjadi masalah dalam pembuatan kebijakan di pemerintahannya.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 35 ayat 1 (a) menjelaskan bahwa TPA dialokasikan di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung ; (b) pengembangan TPA regional yang bekerjasama dengan Kabupaten Pesawaran dengan pola *sanitary landfill* ; (c) mengurangi volume timbulan sampah dengan mengembangkan system *reduce, reuse, recycle* (3R) dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan ; (d) melakukan peremajaan TPA Bakung dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) di setiap subpusat pelayanan kota ; dan (e) pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan sampah mulai dari unit lingkungan pemukiman terkecil hingga skala pelayanan kota.

Pengolahan sampah di Bandar Lampung dilakukan secara bertahap, tidak langsung di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengolahan dan pengangkutan dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan alur yang ditentukan pemerintah. Untuk sampah rumah tangga, sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di kumpulkan di belakang atau di depan masing-masing rumah dalam kantong plastik atau karung yang kemudian akan di ambil oleh petugas kebersihan menggunakan grobak sampah atau grobak motor. Kemudian sampah-sampah yang sudah di kumpulkan di bawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di tiap-tiap wilayah

Kelurahan. Di TPS, sampah kemudian di pilah oleh para petugas. Kemudian sampah yang benar-benar tidak terpakai di angkut menuju TPA menggunakan mobil *truck* sampah. Tempat Pembuangan Akhir di Bandar Lampung terletak di wilayah Teluk Betung yaitu di TPA Bakung.

Data volume sampah di TPA Bakung tahun 2012, menunjukkan jumlah volume sampah di Bandar Lampung mencapai total volume 2.258m³ per hari. Diasumsikan bahwa sumbangan sampah per hari adalah sebesar 2,5 liter per orang. Dengan penduduk yang dapat dikategorikan padat, maka sumbangan sampah 2,5 liter per hari sangat menjadi beban bagi pemerintah. Berikut adalah tabel volume sampah di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Volume Timbulan dan Pengangkutan Sampah Pemukiman di Bandar Lampung tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (m ³)	Jumlah Sampah Terangkut (m ³)	Presentase Pengangkutan Sampah (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Teluk Betung Barat	59.812	149,53	71,38	47,73
2.	Teluk Betung Selatan	92.852	232,13	111,10	47,86
3.	Panjang	63.857	159,64	93,74	58,72
4.	Tanjung Karang Timur	92,074	230,19	100,92	43,84
5.	Teluk Betung Utara	62.825	157,06	77,03	49,04
6.	Tanjung Karang Pusat	72.819	182,05	4,19	2,3
7.	Tanjung Karang Barat	65.878	164,70	80,23	48,71
8.	Kemiling	75.745	189,36	83,96	44,33
9.	Kedaton	88.667	221,67	188,27	65,96
10.	Rajabasa	45.329	113,32	79,17	70,74
11.	Tanjung Seneng	43.826	109,57	82,07	63,03

Bersambung

1	2	3	4	5	6
12.	Sukarame	73.788	184,47	103,35	56,02
13.	Sukabumi	65.843	164,61	100,50	61,05
Jumlah		903.315	2.258,3	1.175,9	52,07

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung tahun 2012

Berdasarkan data di atas, hampir semua kecamatan di Kota Bandar Lampung sudah mampu melakukan pengangkutan sampah sebesar 40 persen dari total timbulan sampah yang ada di masing-masing kecamatan. Beberapa daerah seperti Kecamatan Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, dan Sukabumi mampu melakukan pengangkutan sampah sebesar kurang lebih 50 persen dari total timbulan. Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan persentasi pengangkutan terbesar yaitu 70,74 persen dari total timbulan sampah dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan kecamatan dengan persentasi pengangkutan terkecil yaitu hanya 2,3 persen dari total timbulan sampah.

Daerah-daerah yang sudah mampu melakukan pengangkutan setengah dari total timbulan mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah tersebut sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur di daerah tersebut mampu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sedangkan daerah yang belum mampu untuk melakukan pengangkutan maksimal, dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut masyarakatnya mungkin belum sadar akan keadaan lingkungannya, atau aparturnya kurang tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Persoalan sampah di Kota Bandar Lampung tidak hanya dikelola oleh satu Instansi Pemerintahan saja, namun pengelolaannya dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas yang bertanggung jawab mengenai kebersihan di Bandar Lampung. Disbertam merupakan sektor pimpinan yang memiliki wewenang dalam menangani persoalan sampah di Bandar Lampung. Hal ini tertulis dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 14 tahun 2008 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Disbertam. Akan tetapi dalam penerapan tugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan membagi tugas ke beberapa dinas lainnya untuk mengawasi masalah kebersihan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan beberapa instansi yaitu, pengolahan sampah di wilayah terminal bis antar kota dan dalam kota menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan ; Pengolahan sampah di pasar-pasar tradisional menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar ; Penanganan kebersihan dan sanitasi lingkungan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum ; Pengolahan sampah perairan seperti di sungai-sungai ataupun irigasi menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Pengelolaan sampah di pemukiman menjadi tanggung jawab Kelurahan masing-masing daerah melalui Sokli.

Sokli merupakan badan penanganan kebersihan di lingkungan masyarakat. Sokli bertanggung jawab mengatasi sampah-sampah sisa hasil rumah tangga. Sokli merupakan lembaga kebersihan yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat. Sokli memiliki lingkup yang kecil, hanya mengawasi satu kecamatan/kelurahan, oleh karena itu pengawasan sokli di pegang oleh camat/lurah.

Menurut Kepala Bagian Pengelolaan Sampah Disbertam, Kecamatan Rajabasa adalah salah satu kecamatan di Bandar Lampung yang memiliki kemajuan dalam program sokli dan merupakan daerah dengan jumlah pengangkutan timbulan sampah terbesar. Mereka mampu membeli alat-alat kebersihan sendiri dengan menggunakan uang iuran yang dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa sokli (Pra survei, 2015).

Kecamatan Rajabasa merupakan satu dari 20 kecamatan di Bandar Lampung yang menerapkan program Sokli di wilayahnya. Kecamatan Rajabasa sendiri terbagi ke dalam tujuh kelurahan yaitu, Kelurahan Rajabasa, Gedong Meneng, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pemuka, Gedong Meneng Baru, Rajabasa Raya, dan Rajabasa Jaya.

Kelurahan Rajabasa Raya merupakan salah satu kelurahan yang dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaan kebersihan dan berjalannya program sokli. Kelurahan Rajabasa Raya juga merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Rajabasa (Badan Pusat Statistik, 2014). Mereka mampu membeli alat-alat kebersihan sendiri dengan menggunakan hasil iuran jasa sokli yang dibayarkan oleh pengguna jasa tiap bulannya. Berikut adalah karakteristik dan jumlah penduduk di Kelurahan Rajabasa Raya.

Tabel 2. Karakteristik Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kelurahan Rajabasa Raya

Keterangan	LK I	LK II	Jumlah
Luas Wilayah	189 Ha	169 Ha	358Ha
Jumlah RT	9	11	20
Jumlah Penduduk :			
- Laki-laki	1.795 jiwa	1.736 jiwa	3560 jiwa
- Perempuan	1.615 jiwa	1.615 jiwa	3351 jiwa
Jumlah KK	815 jiwa	863 jiwa	1678 jiwa

Sumber : Database Kelurahan Rajabasa Raya tahun 2014

Penduduk di Kelurahan Rajabasa Raya memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Tingkat pendidikan dapat menjadi tolok ukur dalam penentuan kepedulian masyarakat terhadap keadaan lingkungan. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

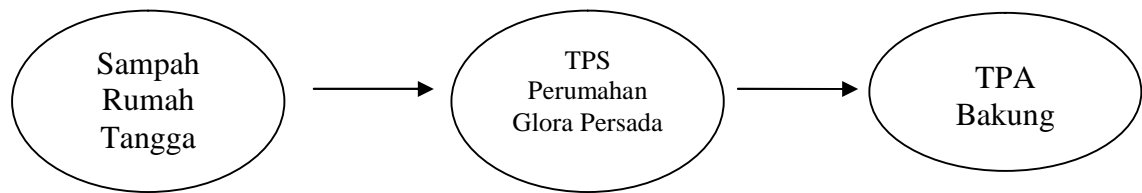
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Rajabasa Raya

Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
TK	493	444	937
SD	940	921	1861
SMP	601	571	1172
SMA	658	645	1303
Sarjana	210	241	451
Jumlah	2902	2822	5724

Sumber : Data Kelurahan Rajabasa Raya tahun 2014

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan di Kelurahan Rajabasa Raya pada tahun 2014 digolongkan ke dalam 5 tingkatan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah terbesar yaitu 1.861 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan sarjana merupakan tingkat pendidikan dengan jumlah masyarakat terendah, yaitu sejumlah 451 jiwa. Dengan tingkat pendidikan yang beragam, maka kepedulian terhadap lingkungan juga memiliki perbedaan. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah pengguna jasa sokli di Kelurahan Rajabasa Raya.

Pengguna jasa sokli di Kelurahan Rajabasa Raya adalah sejumlah 800 Kepala Keluarga, dimana hampir setengah dari jumlah penduduknya menggunakan jasa sokli dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berikut adalah Alur Pengangkutan Sampah di Kelurahan Rajabasa Raya :



Ket: —————> Pengangkutan

Sumber : Sokli Kelurahan Rajabasa Raya, 2014

Gambar 1. Alur Pengangkutan Sampah di Kelurahan Rajabasa Raya

Pengangkutan sampah dilakukan 1 kali sehari selama satu minggu kecuali hari Minggu. Setiap rumah tangga di Kelurahan Rajabasa Raya mengumpulkan sampah sisa konsumsi ke dalam sebuah karung atau plastik dan meletakkannya di depan atau belakang rumah untuk diangkut petugas Sokli. Petugas mengangkut sampah rumah

tangga menggunakan gerobak atau gerobak motor untuk dikumpulkan di TPS yang terletak di Perumahan Glora Persada untuk dilakukan pengolahan. Selanjutnya, sampah yang sudah tidak bisa dipakai di angkut kembali menuju TPA Bakung yang terletak di Teluk Betung. Petugas Sokli tidak membiarkan sampah menginap atau tidak terangkut. Volume sampah yang terangkut oleh petugas Sokli mencapai kurang lebih 5 ton per hari. Berikut adalah peralatan yang menunjang pekerja sokli dalam bertugas mengangkut sampah.

Tabel 4. Peralatan Sokli di Kecamatan Rajabasa Raya

No.	Peralatan	Jumlah	Sumber
1.	Gerobak Motor Tossa	3 buah	- Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Hasil Iuran per Bulan
2.	Gerobak Dorong	5 buah	- Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sumber : Database Kecamatan Rajabasa Raya yang sudah dimodifikasi tahun 2014

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat untuk membayar (*Willingness to Pay*) dalam penggunaan jasa pengolahan sampah (SOKLI) di daerah kecamatan Rajabasa Raya dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh didalamnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “**Analisis *Willingness to Pay* Masyarakat Terhadap Jasa Pengolahan Sampah : Studi Kasus pada Kelurahan Rajabasa Raya**”

B. Rumusan Masalah

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi haruslah berhubungan positif dengan kebersihan lingkungan. Pengelolaan yang didasari oleh suatu studi dan kajian ilmiah tertentu dapat dijadikan suatu dasar atau landasan untuk menyusun suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat, fungsi, dan nilai dari adanya jasa pengolahan sampah. Meningkatnya jumlah pengguna jasa pengolahan sampah dan manfaat adanya jasa tersebut bagi lingkungan dapat menjadi salah satu indikator dalam peningkatan fungsi jasa pengolahan sampah.

Pengelolaan sampah terbagi menjadi 5 komponen sub sistem yang saling mendukung yaitu teknis operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan (hukum/legalitas) dan peran serta masyarakat. Seluruh komponen saling terkait dan harus berjalan secara terpadu dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien (Damanhuri, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Apakah Jumlah Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Frekuensi Pengangkutan mempengaruhi *willingness to pay* masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah?
2. Berapa nilai *willingness to pay* masyarakat terhadap jasa pengolahan sampah?

3. Seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah?

C. Tujuan Penelitian

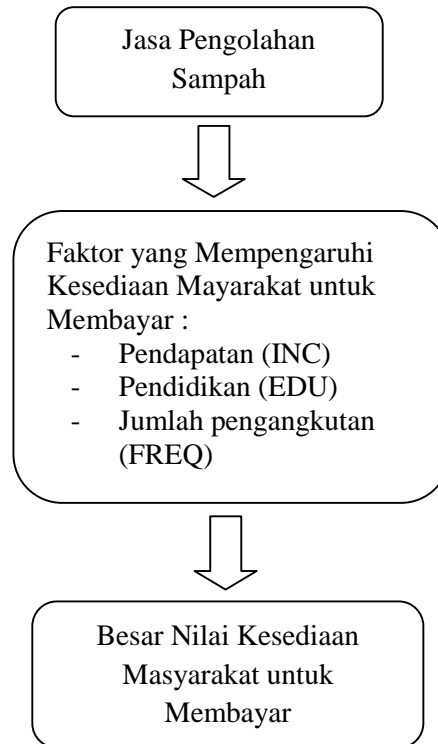
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dimaksudkan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Frekuensi Pengangkutan terhadap *willingness to pay* masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah.
2. Untuk mengetahui besar nilai *willingness to pay* masyarakat terhadap jasa pengolahan sampah.
3. Untuk mengetahui presentasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah.

D. Kerangka Pemikiran

Besaran nilai kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*) masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah dapat ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan jumlah pengangkutan berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk membayar (*willingness to pay*) dalam menggunakan jasa pengolahan sampah. Selain melihat pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap WTP, peneliti juga ingin melihat seberapa besar nilai WTP yang mau di

keluarkan oleh masyarakat dan berapa persentase tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan jasa pengolahan sampah.



Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis Penelitian

Didalam membuat rancangan penelitian, pembuatan hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar (WTP) dalam penggunaan jasa pengolahan sampah seperti pendapatan (INC), pendidikan (EDU), dan jumlah frekuensi pengangkutan sampah (FREQ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Willingness to Pay*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kesediaan membayar masyarakat terhadap penggunaan jasa pengolahan sampah diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan dalam peremajaan peralatan, dan peningkatan kualitas layanan jasa sokli.
3. Sebagai salah satu sumber informasi, wawasan, dan pengetahuan serta informasi sebagai referensi untuk penelitian sejenis.